



Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan

Implementation Of Development Planning Consultation (Musrenbang) In Sei Mati Village, Medan Maimun Sub- District, Medan City

Rizki Ichwanda¹⁾, Beby Masitho Batubara^{1)*} & Walid Musthafa Sembiring²⁾

- 1) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan dan Faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Metode Penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan menurut George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam menciptakan sinergi dan koordinasi dari berbagai unsur. Sumber daya manusia pada implementasi Musrenbang tidak baik hal ini disebabkan karena munculnya sikap apatisme masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan Musrenbang. Disposisi atau sikap pelaksana pada tahap pelaksanaan Musrenbang sudah baik. Struktur birokrasi pada implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan sudah baik. Sedangkan faktor penghambat sumber daya dan komunikasi menjadi faktor kendala dalam implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. Dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih kurang serta kurangnya sosialisasi kelurahan kepada masyarakat.

Kata kunci: Implementasi; Musyawarah Perencanaan Pembangunan; Kelurahan.

Abstract

This article or writing aims to find out the implementation of Musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City and what factors are obstacles to implementing Musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Through observation, interviews and documentation. The theory used according to George Edward III is communication, resources, disposition/attitude of implementers, bureaucratic structure. The results of the research show that communication in the implementation of Musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City is good. This is demonstrated in creating synergy and coordination of various elements. Human resources in the implementation of Musrenbang are not good, this is due to the emergence of community apathy towards participating in every stage of Musrenbang. The disposition or attitude of the implementers at the Musrenbang implementation stage is good. The bureaucratic structure in the implementation of Musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City is good. Meanwhile, resource and communication constraints are factors that hinder the implementation of Musrenbang in Sei Mati Village, Medan Maimun District, Medan City. This is due to the community's lack of understanding and lack of outreach from the sub-district to the community.

Keywords: Implementation; Development Planning Deliberation; Urban village.

How to Cite: Ichwanda. R., Batubara. B.M., & Mustafa. W. (2024). Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(2) 2024: 176-183,

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia, diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sistem demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, diharapkan pemerintah dapat mengelola sumber daya dan menyusun kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Pasaribu, 2017).

Rakyat, yang dalam konteks ini berarti masyarakat, harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengambilan kebijakan karena memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan aktif ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan efektif, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Proses demokratisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan berkontribusi dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal, sehingga memperkuat legitimasi dan keberhasilan kebijakan yang diterapkan (Hutagaol et al., 2020; Kasiatik & Nasution, 2015; Lubis, 2020).

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan bertujuan untuk menjamin bahwa pengambilan kebijakan sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat, tanpa terpengaruh oleh kepentingan individu atau golongan tertentu. Keterlibatan ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan umum dan meminimalisir pengaruh kelompok-kelompok tertentu yang mungkin memiliki agenda pribadi. Dengan cara ini, keputusan yang diambil akan lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan (Sigalingging & Warjio, 2014; Situmorang, 2019; tanggor hasibuan & Zainuddin, 2013).

Sudah sepatutnya pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan semua permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat ditemukan solusi bersama. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mereka memiliki posisi strategis dalam proses pembangunan yang sesungguhnya. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan relevansi dan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan. Hal ini menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, menjadikan proses pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan (Dewantoro et al., 2022; Sukrianto & Saharuddin, 2021; Suwardi, 2006).

Pembangunan dapat tercapai secara optimal ketika pemerintah dan rakyat saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kerjasama yang efektif antara kedua belah pihak menciptakan iklim yang saling menguntungkan, di mana kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih baik, sementara masyarakat aktif berpartisipasi dan mendukung inisiatif pembangunan. Sinergi ini memungkinkan pemecahan masalah yang lebih efektif, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan bahwa hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, tercipta sebuah ekosistem pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan (Hukum & Nusantara, 2017; Putri et al., 2019; Siregar et al., 2022).

Masyarakat dapat mencapai keinginan mereka, sementara pemerintah dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran, jika ada kerjasama yang efektif antara keduanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum penting yang memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Melalui Musrenbang, masyarakat dapat mengemukakan kebutuhan dan prioritas mereka, sementara pemerintah dapat menyusun rencana pembangunan yang lebih responsif dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Proses ini memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara inklusif, berfokus pada kebutuhan riil masyarakat, dan efektif dalam mencapai tujuan bersama (Kusmanto, 2014; Sigalingging & Warjio, 2014; Subandi et al., 2022).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21 adalah forum yang melibatkan berbagai pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional. Musrenbang berfungsi sebagai wadah untuk berdiskusi, merumuskan, dan menyepakati prioritas

pembangunan yang akan dilaksanakan. Forum ini memastikan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya, sehingga rencana pembangunan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih efektif dan inklusif (Ismawati et al., 2023; Rahman, 2022; Sirait et al., 2019).

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari tingkat yang paling kecil, yaitu Desa/Kelurahan, kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan akhirnya pada tingkat Nasional. Proses berjenjang ini dirancang untuk menyerap segala aspirasi masyarakat secara menyeluruh, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan prioritas mereka. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif di setiap tingkatan, Musrenbang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan, sehingga hasil pembangunan lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di semua tingkat pemerintahan (Irhas Jaya, Humaizi, 2020).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatakan bahwa sebuah perencanaan pembangunan merupakan suatu satu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka tahunan, jangka menengah dan jangka panjang yang diselenggarakan oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dianggap sebagai aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan lebih tepat sasaran. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai proses mobilisasi dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan juga tidak hanya dipusatkan oleh partisipasi masyarakat dan pemerintah, tetapi kedua belah pihak akan bersama-sama merumuskan suatu perencanaan sehingga akan menghasilkan perencanaan yang baik.

Kelurahan Sei Mati merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pada setiap tahunnya, Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan melakukan kegiatan Musrenbang. Terkait kegiatan Musrenbang, masyarakat mengusulkan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi sejauh ini selama kegiatan berlangsung belum terdapat perubahan-perubahan yang signifikan terhadap hasil usulan program yang terlaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Usulan Prioritas Kebutuhan Pembangunan Di Kelurahan Sei Mati

No.	Masalah Pokok	Tujuan dan Sasaran
1	Jalan atau gang banyak yang rusak	Perbaiki atau pengerukan parit mencegah terhambatnya banjir
2.	Drainase atau saluran yang kurang berfungsi. Seperti drainase sepanjang Rel PJKA	Perbaiki jalan dapat mencegah kecelakaan dan mengurangi banjir
3.	Tingkat pengangguran masih merata untuk semua lingkungan	Penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat
4.	Tingkat kesehatan yang masih minim	Perbaiki atau pembangunan poskamling dapat meningkatkan keamanan lingkungan

Sumber: Data Musrenbang Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Tahun 2020

Data menunjukkan permasalahan dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Usulan masyarakat tahun 2020 mencakup kebutuhan mendesak seperti perbaikan drainase, jalan, dan fasilitas kesehatan, namun banyak dari usulan tersebut belum terlaksana setelah satu tahun. Implementasi kebijakan publik, termasuk Musrenbang, melibatkan proses praktis yang berbeda dari tahap perumusan kebijakan, dan merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan dapat diwujudkan dengan efektif.

Musrenbang mengikuti pedoman dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, yang mengatur pelaksanaan dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Kelurahan Sei Mati telah melaksanakan Musrenbang tingkat kelurahan setiap tahunnya, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Musrenbang bervariasi di berbagai daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang sudah baik tetapi

tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat karena faktor anggaran, keterbatasan transparansi, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati dan mengidentifikasi kendala yang ada dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati dan mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian kualitatif ini berfokus pada interaksi langsung dengan subjek untuk menggali informasi mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti.

Lokasi penelitian adalah Kelurahan Sei Mati, dan informan yang terlibat terdiri dari Lurah Sei Mati, Ibu Patimah Gabena Harahap, S.Sos sebagai informan kunci; Sekretaris Lurah, Bapak Muhammad Saleh Chery, S.Sos, dan Kasi Pembangunan, Ibu Lusiana Simanjuntak, SE, sebagai informan utama; serta tiga orang masyarakat, yaitu Ibu Sri, Ibu Suryani, dan Bapak Rahman, sebagai informan tambahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lapangan untuk memahami fenomena terkait Musrenbang. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan mengenai implementasi Musrenbang. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber tulisan, lisan, dan gambar yang mendukung penelitian. Triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode untuk meningkatkan validitas informasi.

Penelitian ini mengikuti rancangan deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Musrenbang. Variabel yang diukur meliputi kualitas implementasi Musrenbang, kendala yang dihadapi, dan kualitas partisipasi masyarakat. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, memilih informan yang dianggap memiliki informasi relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menyusun gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan Musrenbang dan kendala yang dihadapi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dengan mendalam bagaimana Musrenbang dilaksanakan dan tantangan yang dihadapinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan

Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dapat dianalisis secara mendalam menggunakan teori George Edward III (Sianturi et al., 2021) mengenai implementasi kebijakan publik, yang meliputi empat aspek utama: komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Musrenbang dijalankan dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan Musrenbang, dan di Kelurahan Sei Mati, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan cukup baik. Proses Musrenbang dimulai dengan tahap persiapan di mana berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat dikumpulkan. Musrenbang ini bertujuan menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang merata dan efektif.

Dalam praktiknya, komunikasi yang baik terlihat dari upaya pemerintah dalam menjalin koordinasi dengan berbagai unsur terkait, termasuk satuan kerja perangkat daerah. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan bahwa usulan masyarakat dapat dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah. Musrenbang harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjadi formalitas. Oleh karena itu, penting bagi pelaku pembangunan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, untuk aktif terlibat dan memberikan kontribusi dalam proses ini.

Namun, meskipun komunikasi dilakukan dengan baik, tantangan muncul ketika usulan masyarakat tidak sepenuhnya diterima atau diimplementasikan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam hal penyampaian informasi dan feedback kepada masyarakat mengenai status dan realisasi usulan mereka.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam pelaksanaan Musrenbang. Proses ini melibatkan tiga tahapan utama: pra Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang, dan pasca Musrenbang. Masing-masing tahapan ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahap pra Musrenbang, partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan usulan sering kali masih rendah. Masyarakat cenderung menunjukkan sikap apatis, yang berdampak pada rendahnya kontribusi ide dan saran dalam Musrenbang. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai pentingnya Musrenbang atau ketidakpercayaan terhadap proses tersebut.

Selama tahap pelaksanaan Musrenbang, meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi, sering kali yang terlibat adalah segelintir orang saja. Partisipasi masyarakat yang terbatas ini mempengaruhi efektivitas Musrenbang dalam menggali kebutuhan dan prioritas masyarakat. Namun, masyarakat yang hadir masih memberikan usulan dan kritikan, yang menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan jika partisipasi lebih luas dapat dicapai.

Pada tahap pasca Musrenbang, pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa usulan yang diterima dapat direalisasikan dengan baik. Pihak pemerintah harus memastikan adanya feedback kepada masyarakat tentang apa yang telah dilakukan terhadap usulan mereka.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana dalam Musrenbang di Kelurahan Sei Mati juga menunjukkan perkembangan positif. Proses pelaksanaan Musrenbang mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan pemerintah Kelurahan Sei Mati berusaha untuk menampung dan memproses usulan masyarakat secara sistematis.

Pada tahap awal, usulan masyarakat dikumpulkan dan diperiksa oleh perangkat Kelurahan. Hal ini memungkinkan pemangku kebijakan untuk memahami lebih rinci mengenai kebutuhan masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan. Dengan adanya pemantauan dan evaluasi, pihak Kelurahan dapat memberikan arahan yang jelas mengenai pembangunan yang harus diprioritaskan.

Sikap pelaksana yang terbuka terhadap usulan masyarakat dan upaya untuk memverifikasi kebutuhan di lapangan menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan Musrenbang yang efektif. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua usulan yang layak dapat diakomodasi dan diimplementasikan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam implementasi Musrenbang. Di Kelurahan Sei Mati, struktur birokrasi telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Daerah Kota Medan Nomor 57 Tahun 2010.

Peraturan ini mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta tugas dan fungsi kelurahan dalam proses Musrenbang. Struktur birokrasi yang ada mendukung pelaksanaan Musrenbang dengan memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Namun, meskipun struktur birokrasi sudah ada, tantangan dalam implementasi tetap ada, seperti koordinasi antara berbagai pihak dan penyusunan prioritas pembangunan. Pengelolaan dokumen dan administrasi yang baik serta pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua tahap Musrenbang dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati menunjukkan beberapa kemajuan, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Aspek komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa Musrenbang dapat berfungsi secara optimal dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perbaikan dalam partisipasi masyarakat, pelaksanaan yang lebih transparan, dan koordinasi yang lebih baik antara

pemerintah dan masyarakat, Musrenbang dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pembangunan di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun.

Faktor Kendala Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan

Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, mengalami berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan keberhasilan proses perencanaan pembangunan tersebut. Kendala-kendala ini dapat diidentifikasi dan dianalisis dalam dua kategori utama: sumber daya dan komunikasi. Memahami faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi yang dapat meningkatkan pelaksanaan Musrenbang dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

A. Sumber Daya: Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Salah satu faktor kendala utama dalam implementasi Musrenbang di Kelurahan Sei Mati adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya proses perencanaan pembangunan. Musrenbang merupakan forum yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam merumuskan dan menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, tanpa pemahaman yang memadai tentang tujuan dan manfaat Musrenbang, masyarakat cenderung tidak aktif berpartisipasi.

Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, informasi mengenai Musrenbang dan proses perencanaan pembangunan sering kali tidak disebarluaskan dengan efektif. Jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana Musrenbang bekerja dan bagaimana mereka dapat berkontribusi, mereka akan cenderung kurang bersemangat untuk terlibat.

Kedua, keterbatasan pengetahuan mengenai proses Musrenbang dan dampaknya pada pembangunan lokal mungkin membuat masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak berpengaruh atau tidak penting. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya yang lebih besar dalam sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang manfaat dan proses Musrenbang. Kampanye informasi yang jelas dan terstruktur, pelatihan bagi warga, dan kegiatan edukatif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat.

2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang rendah juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi Musrenbang. Keterlibatan masyarakat yang minim dalam memberikan usulan atau masukan mengenai pembangunan menunjukkan adanya masalah dalam proses partisipasi. Salah satu penyebab rendahnya partisipasi adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di wilayah mereka. Ketidakpedulian ini sering kali muncul dari kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi mereka dalam proses tersebut.

Sikap apatis masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman buruk di masa lalu, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, atau ketidaknyamanan dalam berpartisipasi. Jika masyarakat merasa bahwa usulan mereka tidak akan diakomodasi atau diimplementasikan, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi aktif.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu ada langkah-langkah strategis yang diambil, seperti menciptakan platform yang lebih inklusif dan aksesibel untuk masyarakat dalam proses Musrenbang. Selain itu, memastikan bahwa usulan dan masukan dari masyarakat benar-benar dipertimbangkan dan diakomodasi dalam rencana pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil Musrenbang.

B. Komunikasi: Kurangnya Koordinasi dan Interaksi

1. Komunikasi yang Tidak Terjalin dengan Baik

Komunikasi antara pihak Kelurahan dan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan Musrenbang. Di Kelurahan Sei Mati, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan Musrenbang. Ketidakkampuan untuk berkomunikasi secara efektif dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan ketidakpuasan di antara masyarakat.

Salah satu masalah utama dalam komunikasi adalah kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi mengenai Musrenbang. Jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang jadwal, agenda, dan hasil Musrenbang, mereka akan merasa terisolasi dan tidak

dilibatkan dalam proses perencanaan. Hal ini dapat memicu rasa ketidakpedulian terhadap kemajuan wilayah mereka dan mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam Musrenbang.

2. Kurangnya Koordinasi Antara Pihak Kelurahan dan Masyarakat

Kurangnya koordinasi antara pihak Kelurahan dan masyarakat dapat mengakibatkan kesenjangan informasi dan pengertian yang menghambat proses Musrenbang. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan usulan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan baik atau tidak dipertimbangkan secara serius oleh pihak pemerintah. Sebagai akibatnya, masyarakat merasa bahwa kontribusi mereka tidak dihargai dan tidak memiliki dampak yang nyata pada pembangunan.

Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti penyelenggaraan pertemuan yang rutin dan terbuka, penggunaan saluran komunikasi yang efektif, dan pembentukan forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak. Dengan meningkatkan koordinasi, pihak pemerintah dapat memastikan bahwa informasi mengenai Musrenbang disampaikan dengan jelas dan bahwa masukan dari masyarakat diintegrasikan dalam proses perencanaan.

Faktor kendala dalam implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, mencakup masalah sumber daya dan komunikasi. Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara pihak Kelurahan dan masyarakat, merupakan kendala utama yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya strategis yang meliputi peningkatan sosialisasi dan pendidikan masyarakat, penciptaan platform partisipasi yang lebih inklusif, dan peningkatan koordinasi serta transparansi dalam komunikasi. Dengan langkah-langkah ini, Musrenbang dapat dioptimalkan sebagai alat perencanaan pembangunan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang lebih merata dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Kelurahan Sei Mati.

SIMPULAN

Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, menunjukkan kemajuan tetapi juga tantangan. Berdasarkan teori George Edward III, aspek komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi teridentifikasi. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sudah baik, tetapi perlu perbaikan dalam feedback usulan. Partisipasi masyarakat rendah, terutama pada tahap pra dan pelaksanaan Musrenbang, memerlukan peningkatan sosialisasi. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen, namun pengkomodasian usulan masih menjadi tantangan. Struktur birokrasi sudah sesuai peraturan, tetapi koordinasi perlu ditingkatkan. Untuk efektivitas Musrenbang, perlu perbaikan dalam partisipasi masyarakat, transparansi, dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sei Mati menghadapi kendala utama terkait sumber daya dan komunikasi. Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat serta komunikasi yang tidak efektif menghambat proses perencanaan. Untuk meningkatkan efektivitas Musrenbang, perlu dilakukan upaya dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta perbaikan dalam koordinasi dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Langkah-langkah ini akan membantu Musrenbang berfungsi lebih optimal dalam perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantoro, D., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2022). Kualitas Pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Polrestabes Semarang. *Perspektif*, 11(4), 1453–1461. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6380>
- Hukum, F., & Nusantara, U. M. (2017). Pengaturan, Penanganan dan Pertanggungjawaban Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pembayaran Cek Giro Kosong. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(2), 94–107.
- Hutagaol, S. M., Arif Nasution, M., & Kadir, A. (2020). Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Pakpak Bharat Improvement of Community Participation in Management of Household Waste in Pakpak Bharat District. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 204–206. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa>

- Irhas Jaya, Humaizi, N. A. (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Management Analysis of Village Fund Management in Jungke. *PERSPEKTIF*, 9(2), 252–262.
- Ismawati, D., Suwarno, S., Pramono, T., Fachruddin, I., & Umanailo, M. C. B. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1), 58–68. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1502>
- Kasiatik, & Nasution, I. (2015). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Deli Serdang. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/p-ISSN: 2549 1660>
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 77–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>
- Lubis, M. F. R. (2020). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658–672. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Putri, R. D., Kadir, A., & Nasution, I. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT . Telkom Regional 1 Sumatera Implementation of Early Pension Program Policy in PT . Telkom Regional 1 Sumatera. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 106–111.
- Rahman, F. (2022). Analisis Prediksi Finansial Distress dengan Metode Altman Z-Score dan Springate Sebelum dan Selama Covid- 19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1000>
- Sianturi, R. R., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sei Kambing B. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185–191. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Volume 2(Desember 2014), 118.
- Sirait, N. D. N., Warjio, W., Harahap, D., & Kadir, A. (2019). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam hal Disiplin Kerja di Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 165–175. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i2.34>
- Siregar, T. P., Jamil, B., & Mustafa, W. (2022). Training Effectiveness in Improving Policy-Preveloping Capabilities for Regional Financial and Assets Management Apparatus. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 37–45. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1182>
- Situmorang, C. P. (2019). Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Menghadapi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 177–190.
- Subandi, A., Noerjoendianto, D., & Reskiaddin, L. O. (2022). Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Mental terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 610–617. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1144>
- Sukrianto, A., & Saharuddin, E. (2021). Strategi Pemerintah dalam Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 135–142. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.605>
- Suwardi. (2006). ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(2).
- tanggor hasibuan, & Zainuddin. (2013). Evaluasi Program Diklat Diluar Balai (Studi Kasus Diklat Ditempat Kerja Tata Persuratan Pada Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Tahun 2013). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 122.